

Kebijakan Sertifikasi Guru dari Perspektif Hubungan Ekonomi Politik dan Pendidikan di Indonesia

Helti Handraini¹, Lince Magriasti²

¹²Prodi Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang, Indonesia

Email: heltihandrainichan@gmail.com, lincemagriasti@fis.unp.ac.id

Abstrak

Artikel ini menjelajahi kebijakan sertifikasi guru di Indonesia dari perspektif hubungan ekonomi politik dan dampaknya terhadap pendidikan. Ini menggali konteks sejarah dan kontemporer dengan tujuan memahami motivasi dan konsekuensi yang mendasarinya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menerapkan analisis dokumen dan tinjauan literatur untuk memeriksa hubungan rumit antara kepentingan ekonomi dan politik dalam membentuk kebijakan sertifikasi. Artikel membahas manfaat ekonomi, seperti peningkatan kualitas guru yang berkontribusi pada tenaga kerja terampil, dan keuntungan politik, termasuk menghindari potensi dampak politik buruk. Temuan ini memberikan wawasan tentang sifat terkait erat antara pertimbangan ekonomi dan politik dalam implementasi sertifikasi guru, menekankan pentingnya memahami dinamika ini untuk kemajuan pendidikan di Indonesia.

Kata kunci: *Sertifikasi Guru, Hubungan Ekonomi-Politik, Kebijakan Pendidikan, Indonesia.*

Abstract

This article explores the policy of teacher certification in Indonesia from the perspective of the economic-political relationship and its implications on education. It delves into the historical and contemporary context, aiming to understand the underlying motivations and consequences. The study utilizes a qualitative research method, employing document analysis and literature review to examine the intricate connections between economic and political interests in shaping the certification policy. The article discusses the economic benefits, such as improved teacher quality contributing to a skilled workforce, and the political advantages, including avoiding potential political repercussions. The findings shed light on the intertwined nature of economic and political considerations in the implementation of teacher certification, emphasizing the importance of understanding these dynamics for the advancement of education in Indonesia.

Keywords: *Teacher Certification, Economic-Political Relationship, Education Policy, Indonesia.*

PENDAHULUAN

Pendidikan memiliki peran sentral dalam pembentukan karakter dan kepribadian anak bangsa sesuai dengan tujuan Pendidikan Nasional di Indonesia. Selain mencerdaskan, pendidikan juga diarahkan untuk membentuk moral dan nilai-nilai agama pada peserta didik. Pendidikan juga memiliki peran penting dalam membentuk masa depan bangsa Indonesia, tidak hanya sebagai upaya untuk mencerdaskan, tetapi juga sebagai solusi untuk mengatasi kebodohan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dalam hal ini, peran guru menjadi krusial,

karena mereka tidak hanya sebagai pendidik tetapi juga sebagai suri tauladan dalam masyarakat.

Komitmen pemerintah terhadap peningkatan kualitas pendidikan tercermin dalam alokasi anggaran yang signifikan. Dengan mengalokasikan sumber daya finansial yang besar, pemerintah mendukung berbagai aspek pendidikan, mulai dari pembangunan infrastruktur hingga peningkatan kesejahteraan guru. Selain melalui aspek finansial, pemerintah juga merancang kebijakan-kebijakan yang mendukung peningkatan kualitas pendidikan. Ini mencakup penetapan standar kurikulum, peningkatan kualifikasi guru, pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran, dan pengembangan sumber daya manusia di bidang pendidikan. Pemerintah tidak hanya menitikberatkan pada upaya peningkatan mutu pendidikan secara langsung, tetapi juga secara aktif terlibat dalam merancang kerangka kebijakan yang mendukung perbaikan keseluruhan sistem pendidikan.

Pengembangan kebijakan pendidikan tidak dapat dilepaskan dari ekonomi politik. Ekonomi politik pendidikan melibatkan analisis biaya dan keuntungan dari kebijakan tertentu, serta pertanyaan mendasar tentang siapa yang diuntungkan dan dirugikan. Dalam hal ini, pemahaman ekonomi politik, seperti yang diungkapkan oleh Martin Staniland, memberikan wawasan lebih dalam terkait dinamika kebijakan pendidikan, menggambarkan bahwa pengambilan kebijakan tidak hanya bersifat teknis, melainkan juga terkait erat dengan dinamika ekonomi dan politik yang melibatkan berbagai pihak dengan kepentingan berbeda. Sehingga, kebijakan pendidikan menjadi bagian integral dari pembangunan nasional yang holistik, mencakup aspek ekonomi, politik, dan sosial.

Dalam kebijakan sertifikasi guru, pemahaman ekonomi politik pendidikan menjadi krusial. Sakban menjelaskan bahwa perilaku masyarakat ekonomi lebih fokus pada pertanyaan mengenai pengorbanan dan keuntungan, sementara perilaku masyarakat politik berfokus pada pertanyaan mengenai penggunaan kekuasaan. Dengan demikian, kebijakan sertifikasi guru tidak hanya menjadi langkah teknis untuk meningkatkan kualitas pendidikan, tetapi juga menjadi bagian dari dinamika ekonomi politik yang melibatkan pihak-pihak yang memiliki kepentingan berbeda dalam sistem pendidikan.

Dalam melihat pentingnya pendidikan sebagai aspek krusial dalam pembangunan nasional Indonesia, perumusan masalah pada artikel ini terfokus pada analisis kebijakan sertifikasi guru dari perspektif hubungan ekonomi dan politik. Dalam artikel ini, akan dijelaskan lebih lanjut bagaimana kebijakan sertifikasi guru di Indonesia dipahami dari perspektif hubungan ekonomi politik dan pendidikan. Analisis ini akan menggali aspek-aspek kebijakan yang berkaitan dengan biaya, keuntungan, serta dampaknya terhadap penggunaan kekuasaan dalam konteks pendidikan nasional.

METODE

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan atau library research. Desain penelitian melibatkan pencarian dan analisis terhadap berbagai sumber literatur, seperti jurnal ilmiah, buku, laporan riset, dan dokumen resmi, yang relevan dengan kebijakan sertifikasi guru dari perspektif hubungan ekonomi dan politik di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendidikan dalam Artian Luas dan Sempit

Dalam pendidikan, terdapat dua konsepsi utama yang sering diakui, yaitu pendidikan dalam artian luas dan sempit. Pendidikan dalam arti luas merujuk pada suatu usaha sadar dan terencana yang bertujuan untuk membentuk dan mengembangkan potensi individu dalam berbagai aspek kehidupan. Definisi ini mencakup tidak hanya aspek akademis atau keterampilan khusus, tetapi juga aspek-aspek seperti kehidupan spiritual, pengendalian diri, pembentukan kepribadian,

pengembangan kecerdasan, penguatan akhlak mulia, dan perolehan keterampilan yang diperlukan untuk kehidupan sehari-hari dan partisipasi aktif dalam masyarakat. Pendidikan dalam arti luas mengakui bahwa proses pembelajaran tidak terbatas pada ruang kelas formal, tetapi dapat terjadi di berbagai konteks dan melibatkan berbagai pengalaman. Tujuannya adalah agar peserta didik dapat aktif mengembangkan diri mereka dan memberikan kontribusi positif bagi diri sendiri dan masyarakat.

Dengan demikian, pendidikan tidak hanya mencakup transfer pengetahuan secara formal, tetapi juga melibatkan pengembangan aspek spiritual, moral, dan keterampilan yang membentuk kepribadian peserta didik. Pendidikan dalam artian sempit, di sisi lain, dapat dilihat sebagai pemahaman yang lebih terbatas hanya pada aspek formal pengetahuan dan keterampilan teknis. Seiring dengan evolusi pemikiran tentang pendidikan, konsepsi ini mencerminkan pandangan holistik dan integral terhadap peran pendidikan dalam membentuk manusia yang berdaya, bermoral, dan berkontribusi positif pada masyarakat (UU RI No. 20 Tahun 2003).

Definisi pendidikan dalam arti luas, seperti yang ditemukan dalam Kamus Bahasa Indonesia (KBI), mengungkapkan bahwa akar kata "pendidikan" berasal dari kata 'didik', yang kemudian diberi tambahan imbuhan 'pe' dan akhiran 'an'. Dengan penggabungan ini, pendidikan menjadi kata yang mencakup metode, cara, dan tindakan membimbing individu. Pendidikan dalam arti luas tidak hanya mengacu pada proses formal di lembaga-lembaga pendidikan, melainkan mencakup seluruh pengetahuan dan pembelajaran yang terjadi sepanjang hayat individu. Pendidikan dalam arti luas didefinisikan sebagai suatu proses yang melibatkan pengetahuan dan pembelajaran di berbagai tempat dan situasi sepanjang hidup individu. Hal ini menekankan bahwa pembelajaran tidak terbatas pada ruang kelas atau institusi formal, melainkan dapat terjadi di mana saja dan kapan saja. Artinya, setiap pengalaman, interaksi, dan situasi kehidupan sehari-hari dapat menjadi konteks bagi pembelajaran. Pendidikan sepanjang hayat ini mengakui bahwa proses belajar tidak hanya terjadi di masa anak-anak atau selama pendidikan formal, melainkan berlangsung terus menerus sepanjang perjalanan hidup seseorang..

Definisi pendidikan dalam arti sempit menekankan dimensi pengajaran yang dilakukan oleh seorang pengajar kepada peserta didik. Fokus utamanya adalah pada interaksi langsung antara pendidik dan peserta didik, dengan tujuan mencapai perubahan dalam etika dan perilaku individu atau kelompok sosial. Proses pengajaran ini didesain untuk mewujudkan kemandirian dan kedewasaan melalui berbagai upaya seperti pendidikan formal, pembelajaran, bimbingan, dan pembinaan. Pengajaran tidak hanya terbatas pada pendidikan formal yang diatur oleh lembaga-lembaga pendidikan resmi. Meskipun pendidikan formal memiliki peran utama, proses pengajaran juga melibatkan peran signifikan dari keluarga dan masyarakat. Dalam hal ini, keluarga dan masyarakat bukan hanya sebagai penonton, tetapi juga sebagai agen pembinaan yang memiliki fungsi penting.

Peran keluarga dalam proses pengajaran mencakup memberikan contoh tauladan, memfasilitasi pembelajaran, memberikan pengarahan, dan mempromosikan peningkatan etika-akhlak pada anak-anak. Keluarga dianggap sebagai lingkungan awal yang membentuk karakter dan nilai-nilai dasar individu. Sementara itu, masyarakat berperan dalam memberikan dukungan, menciptakan lingkungan pembelajaran yang mendukung, dan memperkuat nilai-nilai pendidikan dalam skala yang lebih luas. Dengan keterlibatan aktif dari keluarga dan masyarakat, proses pengajaran dapat menjadi lebih holistik dan menyeluruh. Hal ini diharapkan dapat membentuk individu yang tidak hanya memiliki pengetahuan akademis, tetapi juga karakter dan nilai-nilai moral yang kuat.

Pendidikan dalam Ruang Lingkup Politik

Pendidikan dan politik memiliki hubungan yang erat, di mana politik negara memiliki peran signifikan dalam menentukan arah dan perkembangan pendidikan suatu negara. Keterkaitan ini menjadikan pendidikan sebagai salah satu instrumen

untuk melestarikan dan mengamankan kekuasaan negara. Sebagian besar ahli, termasuk pandangan Michael W. Apple yang dijelaskan dalam tulisan Tilaar (2003: 145), menegaskan bahwa politik kebudayaan suatu negara diarahkan melalui lembaga-lembaga pendidikan. Dengan demikian, dalam ranah pendidikan, kehendak politik dan sistem kekuasaan suatu masyarakat disalurkan dan tercermin.

Pandangan Michael W. Apple menyoroti bahwa lembaga-lembaga pendidikan menjadi saluran untuk mentransmisikan politik kebudayaan negara. Prinsip, doktrin, dan kesepakatan-kesepakatan negara dapat disuntikkan ke dalam masyarakat melalui sistem pendidikan. Upaya menanamkan prinsip-prinsip, doktrin, dan kesepakatan negara melalui pendidikan mencakup berbagai aspek, termasuk nilai-nilai, ideologi, dan identitas nasional. Pendidikan berperan sebagai instrumen untuk membentuk pandangan dan sikap masyarakat terhadap kebijakan negara. Dalam konteks ini, kebijakan pendidikan dan kurikulum dapat menjadi alat untuk membentuk persepsi dan pemahaman masyarakat terhadap kepentingan politik yang diinginkan oleh negara.

Dengan kata lain, pendidikan dalam ruang lingkup politik menjadi sarana penting dalam mencapai tujuan politik dan menjaga stabilitas kekuasaan. Oleh karena itu, pemahaman terhadap keterkaitan antara pendidikan dan politik menjadi krusial untuk mengidentifikasi bagaimana nilai-nilai dan ideologi negara tertentu tercermin dan disalurkan melalui sistem pendidikan. Hal ini juga membuka ruang untuk refleksi kritis terhadap dampak politik dalam konteks pendidikan dan bagaimana masyarakat dapat mengembangkan pemahaman yang kritis terhadap kebijakan-kebijakan pendidikan yang mereka terima.

Pentingnya peran negara, terutama melalui pendidikan, semakin terang benderang mengingat adanya berbagai tantangan kompleks yang dihadapi oleh masyarakat pada masa kini. Tanggung jawab dalam membangun sektor pendidikan menjadi semakin berat dan menantang, memerlukan strategi yang matang dan perhatian khusus. Dalam situasi keterbatasan ekonomi yang dihadapi oleh negara, pembangunan pendidikan seharusnya ditempatkan sebagai prioritas utama yang memerlukan penguatan yang berkelanjutan. Menghadapi kondisi ekonomi yang terbatas, negara seharusnya memprioritaskan pembangunan pendidikan sebagai investasi jangka panjang yang akan membawa dampak positif secara menyeluruh. Banyak negara maju telah menunjukkan bahwa penekanan pada pengembangan sumber daya manusia, khususnya melalui sektor pendidikan yang terfokus, mampu memberikan dukungan yang signifikan bagi keberhasilan pembangunan nasional secara keseluruhan. Pentingnya pendidikan sebagai instrumen utama untuk mengatasi permasalahan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia telah menjadi konsensus global. Negara-negara yang memberikan perhatian serius terhadap pendidikan memiliki peluang lebih besar untuk menciptakan masyarakat yang berpengetahuan, kreatif, dan adaptif terhadap perubahan.

Hubungan antara sistem politik suatu negara dan kebijakan pendidikan memiliki dimensi yang luas dan beragam. Mulai dari perumusan kebijakan hingga evaluasi dampaknya, keterkaitan ini mencakup serangkaian tahapan yang saling terkait. Dalam politik, hubungan antara kedua entitas ini diatur oleh ketentuan dalam Pasal 31 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, menciptakan dasar hukum yang mengikat. Proses perumusan kebijakan pendidikan merupakan langkah krusial yang melibatkan pembentukan dan penetapan kebijakan oleh pemerintah. Keputusan ini mencakup berbagai aspek, termasuk alokasi anggaran, struktur kurikulum, dan strategi pengembangan pendidikan. Langkah selanjutnya adalah memastikan kebijakan pendidikan mendapatkan legitimasi dari berbagai pihak yang berkepentingan, seperti masyarakat dan lembaga-lembaga pendidikan. Proses legitimasi menciptakan dasar hukum dan dukungan sosial yang diperlukan.

Setiap kebijakan pendidikan yang telah dirumuskan harus disampaikan kepada masyarakat secara transparan dan efektif. Proses komunikasi yang baik menjadi penting untuk memastikan pemahaman yang tepat tentang tujuan dan manfaat

kebijakan tersebut. Pengkomunikasian kebijakan mencakup berbagai metode penyampaian informasi untuk mempromosikan pemahaman dan mengatasi potensi resistensi. Pelaksanaan kebijakan pendidikan merupakan fase implementasi yang melibatkan langkah-langkah konkret, seperti penerapan kurikulum, pelatihan guru, dan pengadaan sarana pendidikan. Evaluasi kebijakan menjadi langkah penting untuk mengevaluasi dampak dan efektivitas kebijakan yang telah diimplementasikan. Proses evaluasi memberikan masukan berharga untuk melakukan perubahan atau penyesuaian kebijakan agar lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tujuan pendidikan nasional.

Pendidikan dalam Ruang Lingkup Ekonomi

Dalam perspektif ekonomi, pendidikan dianggap sebagai investasi modal manusia yang esensial untuk memajukan kualitas tenaga kerja. Pendidikan memiliki peran krusial dalam membentuk individu yang tidak hanya memiliki pengetahuan (kognitif), tetapi juga keterampilan (psikomotor) yang dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas. Sebagaimana diutarakan oleh Widiansyah (2017), pendidikan dipandang sebagai industri pembelajaran manusia, menghasilkan individu dengan kemampuan dan keterampilan yang berkontribusi pada perekonomian suatu negara, baik dalam meningkatkan pendapatan individu maupun pendapatan nasional.

Melalui investasi dalam pendidikan, kemampuan dan kualifikasi tenaga kerja dapat ditingkatkan secara signifikan. Dampak positifnya tidak hanya dirasakan dalam sektor industri, tetapi juga merambah ke berbagai unit ekonomi lainnya. Pendidikan memainkan peran kunci dalam membentuk individu yang berkualitas dan memiliki kompetensi yang relevan dengan tuntutan pasar kerja.

Kesejahteraan para pendidik juga turut terpengaruh oleh kemajuan ekonomi dan peningkatan mutu pendidikan. Hubungan erat antara peningkatan mutu pendidikan dengan peningkatan pendapatan ekonomi para pendidik menciptakan suatu dinamika positif. Seiring dengan meningkatnya kualitas pengajaran dan penguasaan materi pendidikan, diharapkan para pendidik dapat merasakan peningkatan dalam aspek ekonomi mereka sendiri. Dalam pandangan yang lebih luas, pertumbuhan ekonomi dan kemajuan pendidikan saling memberikan dukungan yang saling menguntungkan. Peningkatan mutu pendidikan memberikan kontribusi penting dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, yang pada gilirannya akan mendukung pertumbuhan ekonomi suatu bangsa. Dengan demikian, sinergi antara kemajuan ekonomi dan pendidikan diharapkan dapat membawa dampak positif yang berkelanjutan dalam meningkatkan mutu pendidikan suatu bangsa.

Sertifikasi Guru dari Perspektif Hubungan Ekonomi Politik dan Pendidikan di Indonesia

Undang-Undang Guru dan Dosen (UUGD) No. 14 Pasal 1 memberikan gambaran mendalam tentang peran guru sebagai pendidik profesional. Tugas guru mencakup aspek penting, seperti mendidik, mengajar, membimbing, dan menilai peserta didik. Proses seleksi guru melibatkan pendidikan profesi di Lembaga Pendidikan Tenaga Keguruan (LPTK) yang terakreditasi, diikuti uji kompetensi untuk memastikan pemenuhan standar kualifikasi dan profesionalisme. Menurut UU Guru dan Dosen 2005, guru diharapkan memiliki dua aspek utama: keahlian dan pendidikan profesi. Keahlian melibatkan pemahaman mendalam dan aplikasi pengetahuan dalam proses pembelajaran. Pendidikan profesi memberikan keterampilan pedagogis, manajerial, dan interpersonal. Dengan standar ini, guru diharapkan sebagai agen pembelajaran yang menginspirasi peserta didik, membimbing pengembangan keterampilan, pemahaman konsep, dan sikap positif. Melalui kualifikasi tinggi, guru diharapkan memberikan kontribusi pada peningkatan mutu pendidikan nasional, mendukung tujuan menciptakan sumber daya manusia berkualitas dan mampu bersaing secara global.

Proses sertifikasi guru harus dilaksanakan secara obyektif, valid, dan berkeadilan, dengan harapan memberikan dampak positif pada peningkatan kinerja

guru, yang pada gilirannya meningkatkan mutu pendidikan nasional. Meskipun demikian, masih terdapat kecenderungan bahwa guru cenderung terpaku pada kebiasaan lama dan belum sepenuhnya mampu mengembangkan pengetahuan dan wawasannya, terlihat dari kurangnya inisiatif dalam mencari informasi baru baik melalui literatur maupun internet.

Penilaian kinerja atau prestasi kerja, sebagaimana dijelaskan oleh Sulistiadi (2020), menjadi suatu proses krusial dalam organisasi untuk mengevaluasi dan menilai kinerja karyawan. Proses ini memengaruhi keputusan personalia dan memberikan umpan balik kepada karyawan terkait pelaksanaan kerja mereka. Manfaat dari penilaian kinerja termasuk memberikan dorongan kepada karyawan untuk berperilaku positif atau memperbaiki tindakan di bawah standar, memberikan bahan penilaian bagi manajemen, dan menjadi dasar kuat bagi kebijakan peningkatan organisasi. Dalam konteks pendidikan, penilaian kinerja guru merupakan bagian integral untuk memastikan kualitas pendidikan yang optimal.

Evaluasi kinerja, sebagai bagian dari manajemen kinerja, memiliki peran penting dalam mengukur dan mengevaluasi kompetensi individu. Dalam konteks guru, evaluasi kinerja dirancang untuk mencapai dua tujuan utama, yaitu mengukur kompetensi guru dan mendukung pengembangan profesional. Dalam kerangka sertifikasi guru, evaluasi kinerja menjadi instrumen kunci untuk menilai sejauh mana guru memenuhi standar yang ditetapkan dan memberikan arahan untuk pengembangan profesional yang berkelanjutan.

Dari perspektif ekonomi-politik, implementasi sertifikasi guru di Indonesia tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, melainkan juga sebagai strategi untuk meraih keuntungan ekonomi dan politik. Peningkatan kualitas guru diharapkan dapat menciptakan tenaga terampil yang mendukung sektor industri, menghasilkan lapangan kerja, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sertifikasi juga menjadi instrumen politik yang dapat melindungi pemerintah dari risiko pemakzulan atau tekanan politik negatif. Melalui pelaksanaan sertifikasi, pemerintah diharapkan dapat memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 untuk meningkatkan kesejahteraan guru melalui pemberian tunjangan profesi. Tunjangan tersebut, setara dengan satu kali gaji pokok, bukan hanya sebagai bentuk pengakuan terhadap kompetensi guru, tetapi juga sebagai insentif untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara menyeluruh, termasuk bagi guru PNS dan non-PNS di sekolah swasta.

Meskipun demikian, terlihat kecenderungan bahwa unsur kepentingan politik lebih mendominasi dalam implementasi sertifikasi guru jika dibandingkan dengan kepentingan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan guru. Langsungnya pelaksanaan Undang-Undang No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, tanpa penetapan Peraturan Pemerintah dan diikuti Permendiknas No.18/2007, menciptakan keraguan akan keseriusan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan guru untuk mencapai mutu pendidikan yang berkualitas. Hal ini memunculkan kekhawatiran akan dominasi aspek politik dalam implementasi kebijakan pendidikan, yang dapat merugikan guru dan pada akhirnya memengaruhi mutu pendidikan secara keseluruhan.

Karena dilapanganpun kita lihat Guru yang memiliki sertifikasi masih belum profesional dalam menjalankan tugasnya, mereka mendapatkan sertifikasi alih-alih fungsi hanya meningkat kesejahteraan bukan peningkatan mutu. Masih banyak guru yang bersertifikasi tidak bisa menggunakan teknologi, seperti contoh ketika wali murid meminta informasi lewat WAG masih banyak guru yang tidak membalas karena memang tidak bisa menggunakan WA apa lagi dalam bentuk teknologi lain. Kadang kebijakan ini hadir hanya untuk mengalihkan isu atau untuk tujuan nama dan jabatan kedepannya.

SIMPULAN

Dari penelusuran terhadap kebijakan sertifikasi guru di Indonesia dengan memandangnya dari perspektif hubungan ekonomi politik dan pendidikan, dapat disimpulkan bahwa kebijakan tersebut tidak terlepas dari dinamika kompleks antara kepentingan ekonomi dan politik. Implementasi sertifikasi guru diarahkan untuk meraih keuntungan ekonomi melalui peningkatan kualitas tenaga pendidik, seiring dengan harapan menciptakan workforce yang trampil dan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Selain itu, ada elemen keuntungan politik yang termanifestasi dalam upaya menghindari konsekuensi politik yang mungkin timbul, sehingga pemerintah dapat menjaga stabilitas kekuasaannya. Meskipun terdapat aroma kepentingan politik yang kental, hal ini tidak sepenuhnya menghilangkan upaya peningkatan kesejahteraan guru, terutama melalui tunjangan profesi. Namun, tantangan nyata muncul dalam implementasi yang belum sepenuhnya memastikan peningkatan kinerja dan kualitas pendidikan secara menyeluruh. Oleh karena itu, ke depan, perlu ada upaya terus-menerus untuk menyeimbangkan kepentingan ekonomi dan politik agar kebijakan sertifikasi guru dapat berkontribusi maksimal terhadap kemajuan pendidikan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Ab Marisyah¹, Firman², R. (2019). Pemikiran Ki Hadjar Dewantara Tentang Pendidikan. 3, 2–3.
- Adi Widya: Pendidikan Dasar, 4(1), 29. <https://doi.org/10.25078/aw.v4i1.927> Susanto, S. (2017). *Jurnal Pengaruh Politik Hukum Terhadap Sistem Pendidikan Nasional*.
- Agus Puwanto, Pengaruh Politik Dalam Bidang Pendidikan hal. 1-11 , No. 02/Th IV/Oktober/2008. *Jurnal Nurtanio*
- Amini, A., Pane, D., & Akrim, A. (2021). Analisis Manajemen Berbasis Sekolah Dan Kepemimpinan Kepala Sekolah Dalam Peningkatan Kinerja Guru Di Smp Swasta Pemda Rantau Prapat. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(3), 11148-11159.
- Anhar, J., & Darmayanti, R. (2023). Pengaruh Kompetensi Guru Agama Islam Terhadap Implementasi Manajemen Sumber Daya Manusia Di Madrasah Tsanawiyah. *Assyfa Journal of Islamic Studies*, 1(1), 13-23.
- Apiyani, A., Supriani, Y., Kuswandi, S., & Arifudin, O. (2022). Implementasi Pengembangan Keprofesional Berkelanjutan (PKB) Guru Madrasah Dalam Meningkatkan Keprofesional. *JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 5(2), 499-504.
- Ariyanti, Y. (2020). Keterampilan manajerial kepala sekolah dalam meningkatkan kinerja guru. *Akses: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 14(1).
- Fauz, H. N., Perawironegoro, D., & Suyadi, S. (2020). Implementasi Manajemen Mutu Terpadu Sebagai Strategi Efektif Dalam Meningkatkan Kinerja Sekolah. *Adaara: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 10(2), 147-153.
- Hasan, H. (2022). Pelaksanaan Manajemen Supervisi Pendidikan Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Kinerja Guru. *Jurnal Ilmiah Promis*, 3(1), 1-48.
- Jurnal Pendidikan dan Konseling* Volume 4 Nomor 6 Tahun 2022 E-ISSN: 2685936X dan P-ISSN: 2685-9351 Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai
- Manurung, S. R. R. W., Siahaan, A., Syukri, M., & Keling, M. (2023). Implementasi Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidik Di Man Asahan. *Research and Development Journal of Education*, 9(2), 999-1015.
- Mubarok, R. (2021). Pengembangan Manajemen Sumber Daya Manusia di Lembaga Pendidikan Islam. *AL-FAHIM: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 3(2), 131-146.
- Nur, A. (2022). Kapitalisme Pendidikan dan Reinventing Paradigma Pendidikan Indonesia: Sebuah Tinjauan Antropologi Pendidikan. *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 3(1), 69-84.
- Solehan, S. (2022). Implementasi Pengembangan Manajemen Sumber Daya Manusia Pada Lembaga Pendidikan Islam. *JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 5(2), 607-613.

- Sudargini, Y. (2021). Peran Manajemen Pengetahuan Untuk Meningkatkan Kinerja Pada Masa Pandemi Covid 19: Studi Kualitatif Pada Guru SMA di Kabupaten Pati. *Journal of Industrial Engineering & Management Research*, 2(6), 1-12.
- Suprihatiningrum, J. (2017). Guru Profesional Pedoman Kinerja, Kualifikasi, & Kompetensi Guru. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media
- Tanjung, R., Hanafiah, H., Arifudin, O., & Mulyadi, D. (2021). Kompetensi Manajerial Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Kinerja Guru Sekolah Dasar. *JlIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 4(4), 291-296.
- Utamy, R., Ahmad, S., & Eddy, S. (2020). Implementasi Manajemen Sumber Daya Manusia. *Journal of Education Research*, 1(3), 225-236.
- Werdiningsih, W. (2021). Manajemen Sumber Daya Manusia dalam Meningkatkan Kompetensi Guru Melaksanakan Pembelajaran Daring. *Southeast Asian Journal of Islamic Education Management*, 2(1), 113-124.
- Widiansyah, A. (2017). Peran ekonomi dalam pendidikan dan pendidikan dalam pembangunan ekonomi. *Jurnal Jurisprudence*, 6(1), 79. <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v6i1.2994>
- Yahya, M., Alisyahbana, A.N.Q.A., Isma, A., Annas, N. A., & Nurjannah, R. A. (2022). Implementasi Manajemen Sumber Daya Manusia pada Kompetensi Guru SMK 1 Wahyu Makassar. *Yume: Journal of Management*, 5(1), 661-670.